



Sektor Unggulan Daerah Kabupaten Buru

Noch Fernando Jelira^{1*}, M. Faisal Sangadji¹, Abdullah¹

¹Universitas Iqra Buru, Indonesia

*Korespondensi: fernandojeliraunigbu@gmail.com

Info Artikel

Diterima 05
Januari 2022

Disetujui 04
Februari 2022

Dipublikasikan 11
Februari 2022

Keywords:
Sektor Unggulan,
Kabupaten Buru,
Pembangunan
Ekonomi Daerah

© 2022 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembangunan ekonomi daerah melalui sektor unggulan yang ada pada kabupaten Buru. Pendekatan sektoral menitikberatkan pada sektor ekonomi sehingga basis ekonomi menjadi landasan utama dalam proses peningkatan pembangunan daerah di kabupaten Buru. Ada empat subjek utama dalam penelitian ini yaitu (1) sektor unggulan kabupaten Buru dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah (2) analisis basis ekonomi dengan pendekatan Local Question dan Multiplier, (3) Analisis pertumbuhan ekonomi dengan Shift Share, dan (4) Analisis strategi kebijakan dalam rangka peningkatan pengembangan daerah di Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ditemukan lima sektor basis ekonomi di Kabupaten Buru dan tiga belas sektor non basis. Selanjutnya ditemukan bahwa Efek Pengganda (multiplier) Pendapatan Sektor Basis Lebih besar dari pada efek pengganda pendapatan di sektor non Basis.

Abstract

This study examines regional economic development through the leading sectors in Buru district. The sectoral approach focuses on the economic so that the economic base is fundamental in the process of developing regional development in Buru district. There are four main subjects discussed in this study, namely (1) the leading sector of Buru district in relation to regional economic growth (2) analysis of the economic base with the Local Question and Multiplier approach, (3) Analysis of economic growth with Shift Share, and (4) Analysis of policy strategies in the context of increasing regional development in Buru Regency. This study uses mixed methods with the approach of quantitative and qualitative methods. The results showed that there were five basic economic sectors in Buru Regency and thirteen non-basic sectors. Furthermore, it is found that the income multiplier effect in the base sector is greater than the income multiplier effect in the non-base sector.

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah sangat diperlukan dalam upaya mendukung tercapainya percepatan pembangunan nasional. Percepatan dan pemerataan pembangunan akan memberi dampak positif dalam pendayagunaan sumber daya yang tersedia demi tercapainya arus ekonomi yang lebih baik. Oleh sebab itu, pemerintah dan warga memiliki tanggung jawab bersama dalam mendayagunakan

kemampuan secara maksimal dan terintegrasi (Tri Basuki & Gayatri, 2009). Usaha ini diperlukan agar pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air dapat terwujud. Dengan demikian, daerah yang tertinggal dan terpencil juga akan dapat tumbuh berkembang seperti halnya daerah-daerah yang sudah maju dan modern (Mangilaleng et al., 2015).

Sektor ekonomi yang mempunyai kemampuan tumbuh lebih besar cenderung dibesarkan lebih dini yang setelah itu diiringi oleh pertumbuhan sektor lain yang kurang menguntungkan (Marasabessy et al., 2021). Keseluruhan sektor memang tidak dapat diprioritaskan secara serentak, perlu adanya urgensi dan skala prioritas sehingga pengembangan daerah memang harus dilaksanakan secara bertahap (Armelly et al., 2021). Sektor yang memiliki kapasitas perkembangan yang cepat dapat diprioritaskan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh sektor-sektor berikutnya. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan efek dominan pada percepatan sektor lainnya dan pertumbuhan pembangunan pada umumnya.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah oleh sektor nasional atau swasta untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat diukur dengan menggunakan produk domestik bruto (PDRB) daerah (Herman Syahputra, 2015). Produk domestik bruto di daerah merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan dan juga turut menentukan arah pembangunan ke depan (Soeyatno, 2019). Kemudian kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan oleh sebuah wilayah harus disesuaikan dengan kondisi (kebutuhan daerah dan potensi daerah) yang bersangkutan (Ma'ruf, Ahmad., 2003). Oleh sebab itu penelitian tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan agar dapat mengetahui dan menellah informasi pengembangan sebuah wilayah.

Kabupaten Buru memiliki banyak sumber daya dan lokasi yang strategis sehingga memacu Pemerintah Daerah Kabupaten Buru berkeinginan untuk mengelola dan meningkatkan daerahnya (Sam, Belinda, 2019). Serangkaian agenda dicanangkan Pemerintah Kabupaten Buru dalam rangka percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Buru khususnya kawasan yang mempunyai produk ataupun komoditi unggulan dan program- program pendukung lainnya (BPS, 2015).

Lewat bermacam kajian penelitian tentang analisis sektor unggulan dan perencanaan secara matang dan profesional, diharapkan pengembangan daerah pada akhirnya berimbas pada kemajuan ekonomi daerah (Sundaro, 2021). Untuk itu pembangunan sektor unggulan wajib dijadikan prioritas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Buru guna meningkatkan pengembangan daerah secara maksimal.

Kabupaten Buru mempunyai kemampuan sumberdaya yang jika dimanfaatkan akan memberi hasil dan nilai ekonomi yang tinggi. Selama ini sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, kebijakan pembangunan terhadap sektor unggulan daerah harus digaungkan agar permasalahan pembangunan dapat menemukan solusinya.

Berbagai kekurangan dan kelebihan, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru memanfaatkan dan memaksimalkan sumberdaya yang ada, sehingga program pembangunan yang sepanjang ini dicita- citakan bisa berjalan sesuai dengan perencanaan untuk mewujudkan kesejahteraan warga.

Adapun permasalahan penelitian meliputi:

- Sektor unggulan apa saja dari Kabupaten Buru yang dapat dimunculkan sebagai sektor prioritas dalam pembangunan daerah.
- Bagaimana akibat pengganda (Multiplier) pendapatan sektor unggulan Kabupaten Buru.
- Sejauh mana peran dari sektor unggulan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Buru
- Bagaimana strategi kebijakan yang tepat untuk membangun Kabupaten Buru yang berbasis pada sektor unggulan daerah (<https://burukab.bps.go.id/>, 2019).

Penelitian untuk mengkaji pembangunan wilayah berdasarkan sektor utama Kabupaten Buru hanya terfokus pada pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral menitikberatkan pada sektor ekonomi. Pendekatan sektoral yang merangkum dan menganalisis semua kegiatan ekonomi di dalam kawasan yang direncanakan.

2. Metode

Penelitian dilakukan di Kabupaten Buru. Penelitian ini diawali pada bulan Mei hingga Juli 2019. Pemilihan wilayah diagendakan secara terencana berdasarkan pertimbangan dari hasil kajian yang sudah dilakukan. Pertimbangan awal Kabupaten Buru ialah wilayah yang sangat potensial buat dibesarkan, kedua penelitian unggulan masih jadi kajian strategis Pemerintah Wilayah Kabupaten Buru. Informasi yang disampaikan dalam analisis ini merupakan informasi primer serta informasi sekunder (Lismuba Indriani dan Mohammad Abdul Mukhyi, 2013). Informasi primer diperoleh lewat hasil wawancara dengan informan dari lembaga terpaut selaku aksesoris informasi sekunder. Sebaliknya informasi sekunder dikumpulkan dari bermacam sumber antara lain Kantor Bappeda, BPS Kabupaten Buru, BPS Propinsi Maluku serta lembaga ataupun lembaga lain di Kabupaten Buru. Informasi yang diperlukan dari informasi sekunder ialah informasi time series tahun 2015–2019. Informasi sekunder ini berikutnya diolah dengan memakai program Microsoft Excel serta SPSS 17.0.

Penelitian ini berfokus pada tingkat kabupaten (tercantum kecamatan) dengan tujuan untuk mencerminkan studi ekonomi utama dalam memprioritaskan pembangunan daerah. Mixed method analisis dari Crosswell digunakan dalam kajian ini (Sugiyono, 2011).

Tabel 1. Metode Analisis yang digunakan.

Tujuan	Alat Analisis	Jenis Data	Sumber Data
1. Mengidentifikasi Sektor Unggulan Daerah	<i>Location Quetient (Lq)</i>	Pdrb Kabupaten Buru	Bps Kabupaten Buru Dan Provinsi
2. Mengidentifikasi Besarnya Penggandaan Pendapatan	<i>Multipler</i> Pendapatan	Hasil Analsisi Lq	Bps Kabupaten Buru Dan Provinsi
3. Menidentifikasi Besarnya Peranan Sektor Unggulan Terhadap Tingkat	<i>Shift Share</i>	Pdrb Kabupaten Dan Provinsi Wawancara Dan	Bps Kabupaten Buru Dan Provinsi

Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten	Bapedda Dan Dinas-Dinas Terkait Di Kabupaten
---------------------	-------------------------------------	--

Berdasarkan tabel 1 di atas, Location Quotient (LQ) dapat digunakan untuk menganalisis data guna menentukan sector unggulan daerah. Hasil tersebut kemudian dapat digunakan untuk menghitung besarnya efek pengganda pendapatan. Sebaliknya penentuan besaran nilai sector unggulan dalam implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi diukur melalui Shift Share.

Data dalam penelitian ini diambil dari PDRB kabupaten dan propinsi. Adapun data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan informan atau sumber di instansi pemerintah daerah masing-masing.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Location Quotient (LQ)

Dalam rangka menentukan nilai LQ suatu sector terlebih dahulu perlu dikalkulasi rasio persen relatif PDRB Kabupaten Buru berdasarkan Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha terhadap PDRB Provinsi Maluku dari Dasar Harga Konstan 2010 berdasarkan lapangan usaha menggunakan data series tahun 2015 s/d 2019

Tabel 2. Persentase Relatif PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buru Tahun 2015-2019.

Lapangan Usaha	Persen Relatif PDRB Kabupaten Buru ADHK 2010					
	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.84	33.92	34.12	33.99	33.78	33.93
Pertambangan dan Penggalian	0.72	0.70	0.68	0.67	0.67	0.69
Industri Pengolahan	12.78	12.63	12.89	13.13	13.20	12.92
Pengadaan Listrik, Gas	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43
Konstruksi	6.74	6.66	6.56	6.49	6.62	6.61
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.33	3.32	3.28	3.34	3.30	3.31
Transportasi dan Pergudangan	7.44	7.40	7.47	7.53	7.58	7.49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.30	1.28	1.26	1.24	1.23	1.26
Informasi dan Komunikasi	1.43	1.42	1.41	1.39	1.37	1.40
Jasa Keuangan	1.92	1.96	1.89	1.90	1.86	1.91
Real Estate	0.46	0.44	0.43	0.41	0.39	0.43
Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19.73	19.98	19.89	19.86	19.98	19.89
Jasa Pendidikan	4.35	4.40	4.37	4.34	4.33	4.36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.61	3.56	3.50	3.47	3.48	3.52
Jasa lainnya	1.69	1.66	1.63	1.60	1.61	1.64
TOTAL PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: burkab.go.id (Data ini didapatkan dari hasil DPR kabupaten Buru pada tahun 2019)

Langkah berikutnya adalah perhitungan rasio PDRB Relatif berdasarkan PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2010 yang didasarkan pada lapangan usaha, dengan menggunakan data series tahun 2015 s/d 2019

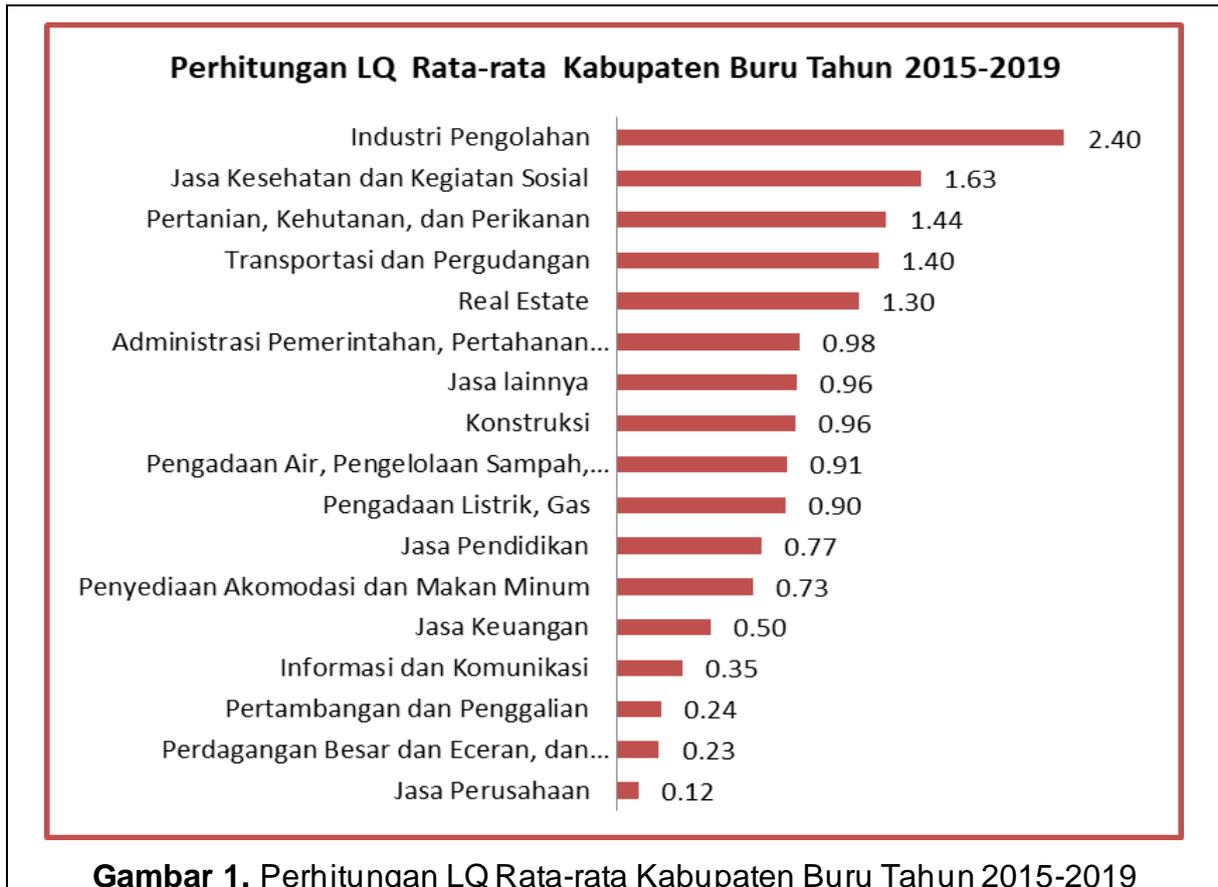
Tabel 3. Persentase Relatif PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Persen Relatif PDRB Provinsi Maluku ADHK 2010					
	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.77	23.54	23.58	23.28	23.33	23.50
Pertambangan dan Penggalian	3.26	3.21	3.04	2.66	2.43	2.92
Industri Pengolahan	5.38	5.44	5.39	5.46	5.31	5.39
Pengadaan Listrik, Gas	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.47
Konstruksi	6.89	6.84	6.83	6.96	7.09	6.92
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.34	14.37	14.81	14.85	15.08	14.69
Transportasi dan Pergudangan	5.48	5.39	5.29	5.29	5.27	5.34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.84	1.73	1.71	1.69	1.69	1.73
Informasi dan Komunikasi	3.95	4.03	4.04	4.01	3.94	3.99
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.72	3.84	3.79	3.83	3.83	3.80
Real Estate	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.33
Jasa Perusahaan	1.04	1.01	1.00	0.99	0.99	1.01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Lainnya	19.99	20.16	20.17	20.61	20.63	20.31
Jasa Pendidikan	5.52	5.64	5.63	5.66	5.72	5.63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.18	2.18	2.15	2.14	2.15	2.16
Jasa lainnya	1.71	1.71	1.68	1.69	1.69	1.70
TOTAL PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan perbandingan persen relatif PDRB ADHK Kabupaten Buru dan Provinsi Maluku diperoleh 5 (lima) kategori sektor basis di Kabupaten Buru yang memiliki keunggulan komparatif (Nilai LQ-nya >1), diantaranya:

- Industri Pengolahan (LQ sebesar 2,40)
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (LQ sebesar 1,63)
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (LQ sebesar 1,44)
- Transportasi dan Pergudangan (LQ sebesar 1,40)
- Real Estate (LQ sebesar 1,30)

Berikut urutan nilai Location Quotient di Kabupaten Buru berdasarkan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Periode Tahun 2015-2019.



Keunggulan komparatif pada penelitian basis jenis industri pengolahan hadapi penyusutan pada tahun 2016 berikutnya hadapi kenaikan. Pada jenis jasa kesehatan serta aktivitas sosial cenderung hadapi penyusutan semenjak tahun 2016 hingga tahun 2019, tetapi bersamaan mewabahnya penyakit covid-19 hingga dengan dikala ini belum ada informasi terpaut jenis tersebut, apakah hadapi kenaikan ataukah malah penyusutan. Pada jenis pertanian, kehutanan serta perikanan ada kecenderungan penyusutan pada tahun 2018 serta 2019, sebaliknya pada kategori transportasi serta pergudangan cuma hadapi penyusutan pada tahun 2016 berikutnya hadapi tren penimngkatan, kebalikannya jenis real estate hadapi tren penyusutan semenjak tahun 2016 hingga tahun 2019.

Tidak hanya penelitian basis ada pula 12 (dua belas) penelitian non basis selaku penelitian penunjang, penelitian non basis yang bisa diasumsikan selaku penelitian yang belum mandiri serta butuh kenaikan keahlian kapasitas usaha sebab kurang penuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Buru.

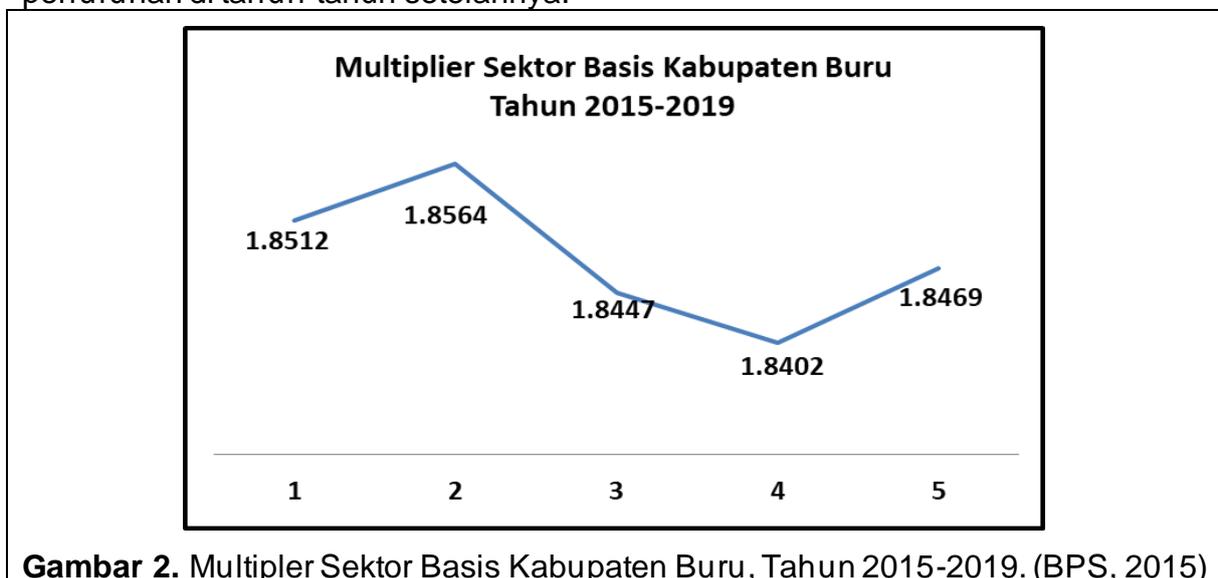
3.2 Analisis Efek Pengganda (Multiplier)

Nilai besaran multiplier effect berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Grafik pengurangan belanja diperoleh melalui penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah, sehingga menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian gaji atau pendapatan dan pertumbuhan tenaga kerja dapat diidentifikasi dari pengganda ekonomi basis. Total pendapatan daerah tersebut dihiitung dari penggandaan (multifikasi) dari proses perdagangan dan jual beli suatu daerah terhadap pemsaran keluar (expor) barang jasa tersebut keluar daerah.

Tabel 4. Efek Pengganda (Multiplier) Pendapatan pada Sektor Basis di Kabupaten Buru Tahun 2015-2019.

TAHUN	Pendapatan (Milyar Rupiah)		Multiplier Sektor Basis
	Pendapatan Sektor Basis	Total Pendapatan	
2015	669.36	1.239.10	1.8512
2016	705.67	1.310.00	1.8564
2017	752.83	1.388.73	1.8447
2018	801.58	1.475.07	1.8402
2019	847.07	1.564.43	1.8469

Dari table ini kita bisa melihat bahwa multiplier yang didapatkan dari sektor basis bernilai lebih besar dari sektor non basis dalam kurun waktu dari tahun 2015-2019. Ada peningkatan sebesar 1,8512 pada tahun 2016 kemudian terjadi penurunan di tahun-tahun setelahnya.

**Gambar 2.** Multipler Sektor Basis Kabupaten Buru, Tahun 2015-2019. (BPS, 2015)

3. Analisis Shift Share

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru dapat dihitung lewat analisis Shift Share. Mengingat peranannya yang sangat penting, maka Shift Share seringkali digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor ekonomi selang periode tertentu.

a. Perubahan PDRB

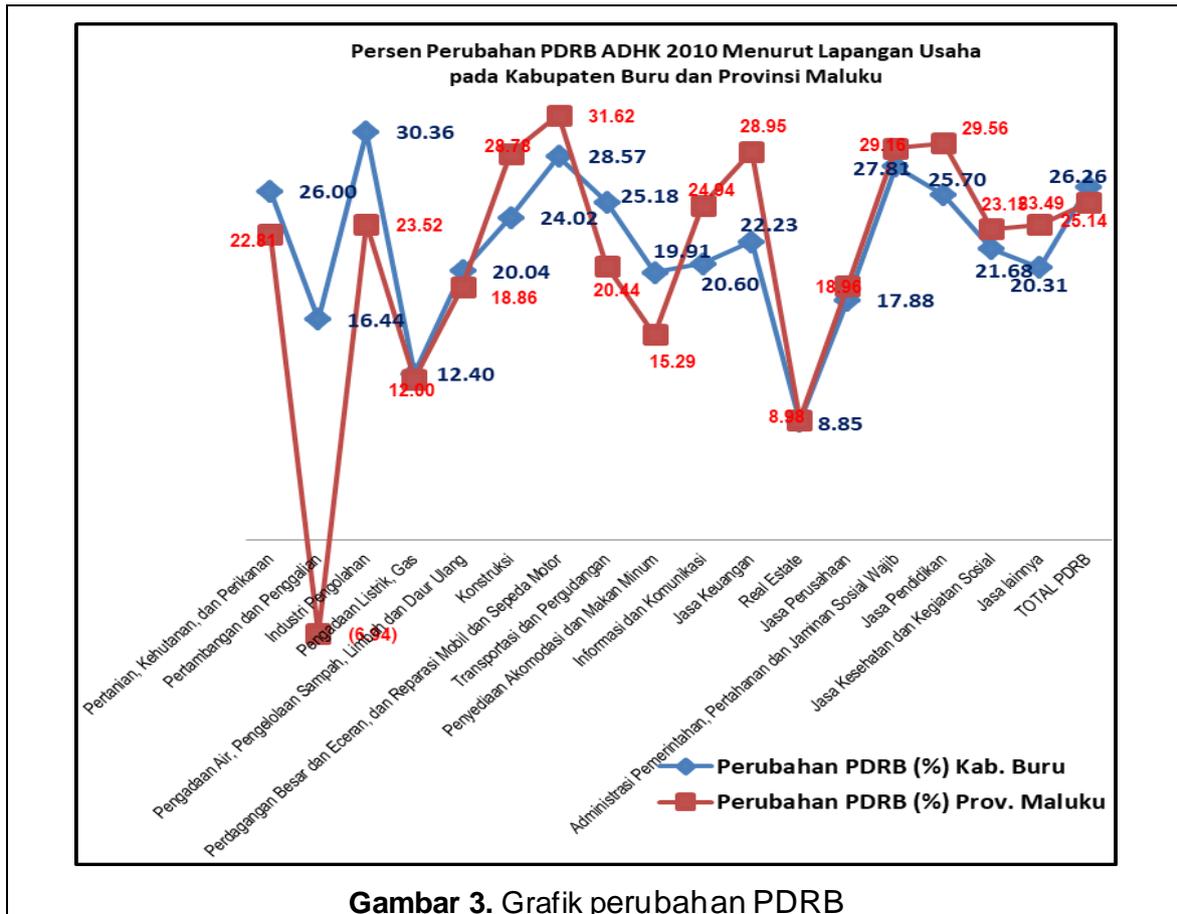
Unsur utama Shift Share adalah Perubahan indikator kegiatan ekonomi (PDRB) yang biasanya ada dalam setiap sektor lapangan usaha. Dalam tabel 2.1 tersebut PDRB Kabupaten Buru adalah sebesar 26,26 % dan propinsi Maluku sebesar 25,14%.

Tabel 5. Perubahan PDRB

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Buru ADHK 2010				PDRB Provinsi Maluku ADHK 2010 (Milyar			
	(Milyar Rupiah)				Rupiah)			
	2015	2019	Perubahan	(%)	2015	2019	Perubahan	(%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	419.35	528.39	109.04	26.00	5,908.36	7,256.23	1,347.87	22.81
Pertambangan dan Penggalian	8.94	10.41	1.47	16.44	811.27	754.98	(56.29)	(6.94)
Industri Pengolahan	158.37	206.45	48.08	30.36	1,336.32	1,650.66	314.34	23.52
Pengadaan Listrik, Gas	1.21	1.36	0.15	12.40	26.99	30.23	3.24	12.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.44	6.53	1.09	20.04	119.48	142.01	22.53	18.86
Konstruksi	83.46	103.51	20.05	24.02	1,712.13	2,204.85	492.72	28.78
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	92.23	118.58	26.35	28.57	3,564.80	4,692.08	1,127.28	31.62
Transportasi dan Pergudangan	41.30	51.70	10.40	25.18	1,361.61	1,639.97	278.36	20.44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.07	19.27	3.20	19.91	456.30	526.08	69.78	15.29
Informasi dan Komunikasi	17.72	21.37	3.65	20.60	981.13	1,225.78	244.65	24.94
Jasa Keuangan	23.84	29.14	5.30	22.23	924.51	1,192.11	267.60	28.95
Real Estate	5.65	6.15	0.50	8.85	87.09	94.91	7.82	8.98
Jasa Perusahaan	1.51	1.78	0.27	17.88	258.71	307.77	49.06	18.96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	244.53	312.53	68.00	27.81	4,969.72	6,418.98	1,449.26	29.16
Jasa Pendidikan	53.86	67.70	13.84	25.70	1,372.33	1,778.00	405.67	29.56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	44.69	54.38	9.69	21.68	542.49	668.09	125.60	23.15
Jasa lainnya	20.93	25.18	4.25	20.31	425.97	526.05	100.08	23.49
TOTAL PDRB	1,239.10	1,564.43	325.33	26.26	24,859.21	31,108.78	6,249.57	25.14

Perubahan produksi atau kesempatan kerja tertinggi di Kabupaten Buru ada pada sektor industri pengolahan sebesar 30,36%, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 28,57%, administrasi pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 27,81%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,00%, jasa pendidikan sebesar 25,70%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 21,68%, informasi dan komunikasi sebesar 20,60%, jasa lainnya sebesar 20,31%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 20,04%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 19,91%, jasa perusahaan sebesar 17,88%, pertambangan dan penggalian sebesar 16,44%, pengadaan listrik dan gas sebesar 12,40%, dan real estate sebesar 8,85%.

Perubahan produksi atau kesempatan kerja tertinggi di Provinsi Maluku terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 31,62%, jasa pendidikan sebesar 29,56%, administrasi pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 29,16%, jasa keuangan sebesar 28,95%, konstruksi sebesar 28,78%, informasi dan komunikasi sebesar 24,94%, industri pengolahan sebesar 23,52%, jasa lainnya sebesar 23,49%. jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,15%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,81%, transportasi dan pergudangan sebesar 20,44%, jasa perusahaan sebesar 18,96%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 18,86%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,29%, pengadaan listrik dan gas sebesar 12,00%, real estate sebesar 8,98%, dan pertambangan dan penggalian sebesar -6,94%.



Gambar 3. Grafik perubahan PDRB

b. Komponen Pertumbuhan Daerah

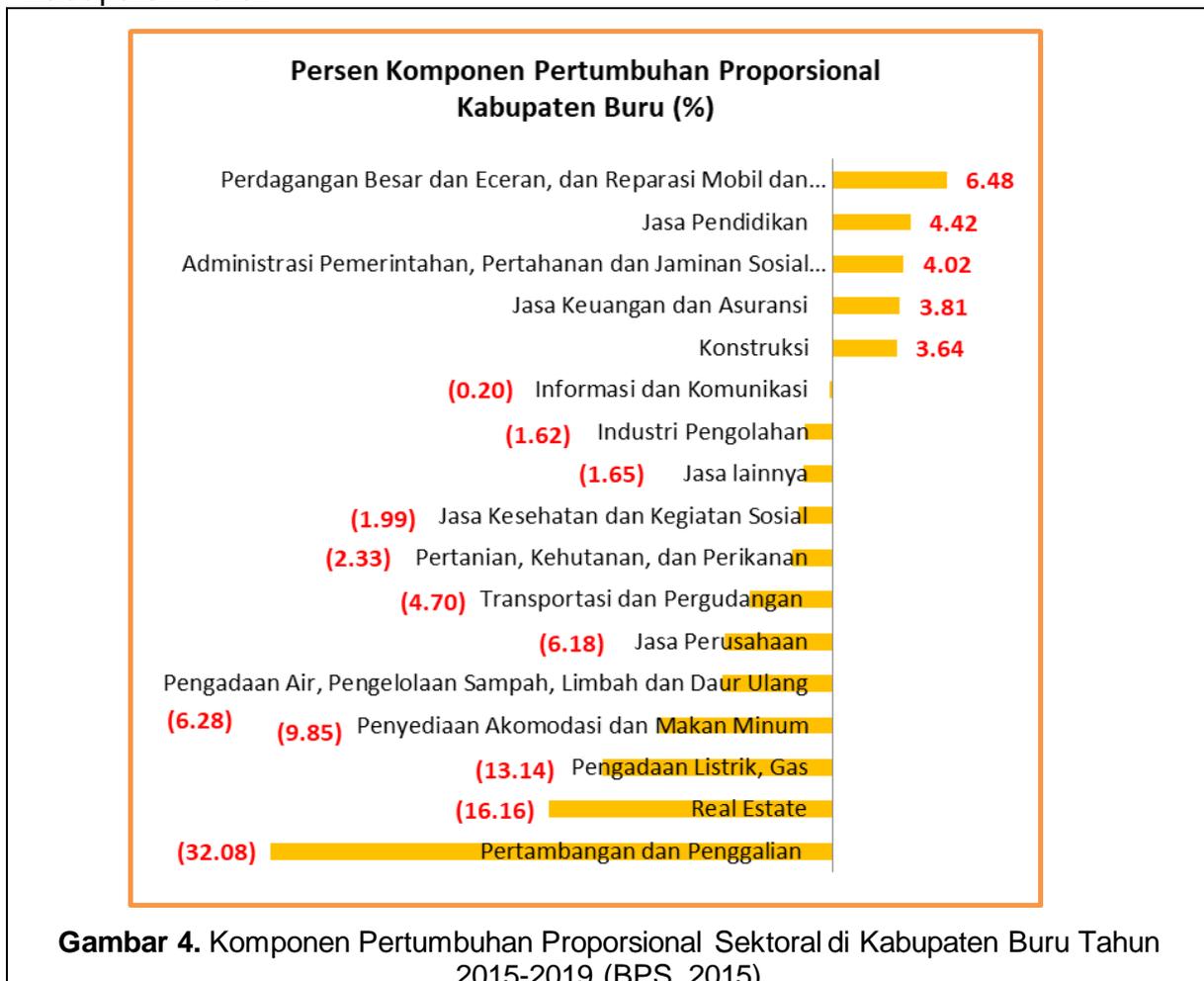
Komponen pertumbuhan daerah terdiri atas komponen pertumbuhan Propinsi (KPP), komponen pertumbuhan proposional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa daerah (PPW).

Tabel 7. Komponen Pertumbuhan Daerah di Kabupaten Buru.

Lapangan Usaha	KP Provinsi		KP Proporsional		KP Pangsa Wilayah	
	Ra * Yij	%	(Ri-Ra)*Yij	%	(ri-Ri)*Yij	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	105.42	25.14	(9.76)	(2.33)	13.37	3.19
Pertambangan dan Penggalian	2.25	25.14	(2.87)	(32.08)	2.09	23.38
Industri Pengolahan	39.81	25.14	(2.56)	(1.62)	10.83	6.84
Pengadaan Listrik, Gas	0.30	25.14	(0.16)	(13.14)	0.00	0.39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.37	25.14	(0.34)	(6.28)	0.06	1.18
Konstruksi	20.98	25.14	3.04	3.64	(3.97)	(4.75)
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.19	25.14	5.98	6.48	(2.82)	(3.05)
Transportasi dan Pergudangan	10.38	25.14	(1.94)	(4.70)	1.96	4.74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.04	25.14	(1.58)	(9.85)	0.74	4.62
Informasi dan Komunikasi	4.45	25.14	(0.04)	(0.20)	(0.77)	(4.34)
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.99	25.14	0.91	3.81	(1.60)	(6.71)
Real Estate	1.42	25.14	(0.91)	(16.16)	(0.01)	(0.13)
Jasa Perusahaan	0.38	25.14	(0.09)	(6.18)	(0.02)	(1.08)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	61.47	25.14	9.83	4.02	(3.31)	(1.35)
Jasa Pendidikan	13.54	25.14	2.38	4.42	(2.08)	(3.86)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.24	25.14	(0.89)	(1.99)	(0.66)	(1.47)
Jasa lainnya	5.26	25.14	(0.34)	(1.65)	(0.67)	(3.19)

Komponen pertumbuhan Propinsi (KPP) sebesar 0,25 atau Rp. 311,51 milyar dan memberikan pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru. Secara sektoral kontribusi terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar Rp. 105,42 milyar sedangkan nilai KPP terkecil terdapat pada sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar Rp. 300 juta.

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat regional, artinya bila terjadi perubahan kebijakan pada sektor perekonomian maka komponen pertumbuhan akan terkoreksi secara riil yang mempengaruhi kontribusi sektor perekonomian terhadap pendapatan PDRB Kabupaten Buru.



Dari table ini dapat dilihat bahwa Komponen Pertumbuhan Proporsional sangat dipengaruhi oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah dalam membangun daerah. Sehingga factor tersebut harus menjadi fokus perhatian yang tidak bisa disepelekan.

4. Penutup

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa di daerah Kabupaten Buru terdapat lima sektor unggulan yang menjadi basis ekonomi daerah dan terdapat tiga belas sektor lain yang termasuk kedalam sektor non basis. Lima Sektor Unggulan di Kabupaten Buru yang menjadi basis ekonomi daerah antara lain

Sektor Industri Pengolahan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor Real Estate. Sedangkan tiga belas sektor lainnya termasuk kedalam sektor non basis adalah terutama pada sektor yang berorientasi pada jasa. Selanjutnya besaran nilai multiplier berkorelasi erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan baik sektor basis maupun sektor non basis mengalami pengaruh peningkatan atau penurunan yang berkaitan erat dengan kenaikan atau penurunan pendapatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Armelly, A., Rusdi, M., & Pasaribu, E. (2021). Analisis sektor unggulan perekonomian Indonesia: Model input-output. *Sorot*, 16(2), 119. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.119-134>
- BPS. (2015). *PDRB Menurut Lapangan Pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2010-2014*.
- Herman Syahputra, A. (2015). Analisis Sektor Unggulan Dan Perubahan Struktur Perekonomian Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 56–68. <https://burukab.bps.go.id/>. (2019). *BPS KABUPATEN BURU*. <https://Burukab.Bps.Go.Id/>. <https://burukab.bps.go.id/>
- Lismuba Indriani dan Mohammad Abdul Mukhyi. (2013). *SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN INDONESIA: PENDEKATAN INPUT-OUTPUT*. 5, 8–9.
- Ma'ruf, Ahmad. (2003). Penentuan Sektor Unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 4(1).
- Mangilaleng, E. J., Rotinsulu, D., & Rompas, W. (2015). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04), 193–205.
- Marasabessy, R. N., Rumkel, L., Susiati, S., Masniati, A., Tuasalamony, K., Amir, N. F., Iye, R., & Hatuwe, R. S. M. (2021). Analisis potensi dan strategi pariwisata pantai di Kabupaten Buru. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(1), 149–164. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i1.858>
- Sam, Belinda, E. a. (2019). Female Feminism in the Customary Island of Buru. . ." *Int. J. Sci. Technol.*, 8(8), 234–244.
- Soeyatno, R. F. (2019). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Terhadap Perekonomian Wilayah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016. *JURNAL SeMaRaK*, 1(3). <https://doi.org/10.32493/smk.v1i3.2258>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sundaro, H. (2021). Studi Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24167/jemap.v4i1.3126>
- Tri Basuki, A., & Gayatri, D. U. (2009). PENENTU SEKTOR UNGGULAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(1), 34–50.